



**BUPATILAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN  
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

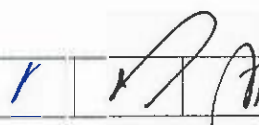
**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Kabupaten Lamandau merupakan Rumah Sakit Milik Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan

1				
---	--	--	--	--

Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit  
Umum Daerah Lamandau.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

/	/	/	
---	---	---	--

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

/	A	(D)	
---	---	-----	--

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan





prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah badan layanan dilindungi Pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur pada RSUD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pimpinan BLUD RSUD adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk sebagai pejabat pengelola BLUD RSUD.
9. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur yang melakukan pengawasan terhadap operasional BLUD RSUD yang dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas

/				
---	--	--	--	--

dan setuju bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya RKA-PD adalah dokumen rencana keuangan tahunan PD.
18. Ringkasan RBA adalah Dokumen Ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD RSUD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
19. RBA Definitif yang selanjutnya disebut RBA Definitif adalah RBA BLUD RSUD yang telah disesuaikan dengan pagu anggaran BLUD RSUD yang tercantum dalam APBD.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
21. Prioritas dan plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
22. Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran BLUD RSUD.



### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip-prinsip penganggaran BLUD;
- b. penyusunan RBA;
- c. pengajuan anggaran BLUD;
- d. penetapan dan pelaksanaan anggaran BLUD; dan
- e. perubahan anggaran BLUD.

## **BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN BLUD**

### **Pasal 4**

Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan daerah, maka penganggaran BLUD RSUD berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. RBA dan laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan laporan keuangan Pemerintah;
- b. dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan, dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- c. BLUD RSUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (Lima) tahunan dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. BLUD RSUD menyusun rencana anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. seluruh pendapatan BLUD RSUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan.
- f. pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD;
- g. pagu anggaran BLUD RSUD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan jenis belanja;
- h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf g, dituangkan dalam RBA; dan
- i. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

/				
---	--	--	--	--



**BAB IV**  
**PENYUSUNAN RBA**

**Bagian Kesatu**  
**Acuan dan Proses Penyusunan RBA**

**Pasal 5**

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan menyusun dengan mangacu kepada:
  - a. rencana strategis bisnis BLUD; dan
  - b. pagu anggaran BLUD RSUD dalam APBD dan DPA.
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan ringkasan disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD RSUD dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBD dan DPA.
- (4) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode top down (dari atas ke bawah dan bottom up (dari bawah ke atas) yang dimulai dari policy statement (pernyataan kebijakan) oleh pemimpin dan dewan pengawas BLUD RSUD.

**Pasal 6**

- (1) RBA disusun berdasarkan:
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD.





## Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), BLUD menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat disusun per unit kerja pada BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, bersumber dari :
  - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
  - d. penerimaan lainnya yang sah;
  - e. penerimaan anggaran yang bersumber APBD/APBN; dan/atau
  - f. hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

## Pasal 8

RBA paling sedikit memuat :

- a. program dan kegiatan;
- b. target kinerja (output);
- c. kondisi kerja tahun berjalan;
- d. asumsi makro dan mikro;
- e. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;
- f. perkiraan biaya; dan
- g. perkiraan maju (forward estimate).



## Pasal 9

- (1) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e, dan target kinerja (output) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, sama dengan rumusan program, kegiatan, dan target kinerja yang ada dalam APBD dan DPA.
- (2) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per unit layanan pada BLUD RSUD.
- (3) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d, merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
- (4) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas BLUD RSUD.
- (5) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD RSUD.
- (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target BLUD RSUD tersebut.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e, disusun menggunakan basis kas.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi data masukan untuk penyusunan rancangan APBD.
- (9) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f, dapat digunakan disusun menggunakan basis akrual.
- (10) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g, digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
- (11) Perkiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dicantumkan dalam RBA paling kurang sampai dengan 1 (satu) tahun kedepan.
- (12) Contoh format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

/	↖	h		
---	---	---	--	--

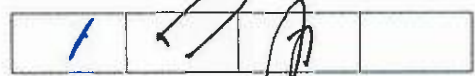
**Bagian Kedua**  
**Penjabaran Anggaran BLUD RSUD**

**Pasal 10**

- (1) Perkiraan biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, mengacu kepada rencana kebutuhan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

**Pasal 11**

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri dari :
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lainnya.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;



- d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lainnya.
- (6) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bank;
  - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
  - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. biaya non operasional lain-lainnya.

### **Pasal 12**

- (1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf a, sampai dengan huruf f, serta biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f, dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rincian biaya sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
- (2) Penjabaran dalam rincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dicantumkan dalam RBA atau dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisah dari RBA.

### **Pasal 13**

- (1) Rincian anggaran belanja BLUD RSUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam RBA sampai pada rekening jenis belanja.
- (2) Rincian anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.

## **Bagian Ketiga Penyusunan Ringkasan RBA**

### **Pasal 14**

- (1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi anggaran BLUD RSUD ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.

/	/	/	/	/
---	---	---	---	---



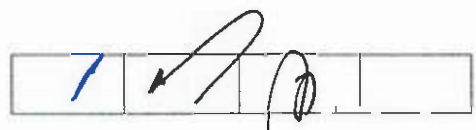
- (2) Ringkasan RBA konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ikhtisar pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.

#### **Pasal 15**

- (1) BLUD RSUD mencantumkan pendapatan dan biaya yang ada dalam RBA ke dalam pendapatan dan belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan biaya yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh pendapatan BLUD RSUD selain yang bersumber dari APBD/APBN.
- (4) Belanja yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup semua belanja BLUD RSUD, meliputi belanja yang didanai dari APBD, dari pendapatan BLUD, dan saldo awal kas BLUD.
- (5) Contoh format ringkasan RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Belanja yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dicantumkan ke dalam ringkasan RBA mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD RSUD dan dari awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam satu program, satu kegiatan dan tigajenis belanja.
- (3) Satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RSUD.
- (4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (5) Tigajenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang/jasa; dan
  - c. belanja modal.



- (6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, merupakan belanja pegawai langsung yang didanai pendapatan BLUD RSUD.
- (7) Belanja barang/jasa yang didanai dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan biaya yang digunakan untuk biaya operasional pelayanan dan pendukungnya.
- (8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, merupakan belanja yang digunakan untuk modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya dilingkungan RSUD.
- (9) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/ *software* yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

**BAB V**  
**PENGAJUAN ANGGARAN BLUD**

**Bagian Kesatu**  
**Proses Penganggaran BLUD**

**Pasal 17**

Proses penganggaran BLUD RSUD dilakukan sebagai berikut :

- a. berdasarkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-PD, KUA dan PPAS, BLUD RSUD menyusun RBA dan ringkasan RBA;
- b. setelah mendapat saran dan masukan dari dewan pengawas, pemimpin BLUD RSUD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan PD;
- c. bagian anggaran pada PD keuangan daerah bersama PD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD;
- d. BLUD RSUD memperbaiki ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran PD melalui BKD untuk dilakukan penelaahan; dan
- e. ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada BKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



**Bagian Kedua**  
**Pengajuan Ringkasan RBA**

**Pasal 18**

- (1) Pemimpin BLUD RSUD mengajukan ringkasan RBA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh BKD sebagaimana bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan rancangan RBA.
- (3) Ringkasan RBA dan rancangan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh pemimpin BLUD RSUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal BLUD RSUD belum dan/atau tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh pemimpin BLUD RSUD dan diketahui oleh pejabat terkait yang ditunjuk oleh Bupati dan di setujui oleh Bupati.

**BAB VI**  
**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD**

**Bagian Kesatu**  
**RBA Definitif**

**Pasal 19**

Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD RSUD ditetapkan bersama dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD.

**Pasal 20**

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemimpin BLUD RSUD menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD RSUD yang tercantum di dalam APBD dan DPA.



- (3) RBA definitif ditandatangani oleh pemimpin BLUD RSUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat terkait yang ditunjuk oleh Bupati dan di setujui oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4).

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Anggaran BLUD**

**Pasal 21**

DPA yang telah disahkan oleh BKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD sesuai dengan plafon dan rincian anggaran baik yang bersumber dananya berasal dari APBD maupun yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD RSUD.

**Pasal 22**

Berdasarkan RBA definitif BLUD RSUD merealisasi penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan.

**Pasal 23**

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang bersumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman pada rincian belanja dalam dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PERUBAHAN ANGGARAN BLUD RSUD**

**Bagian Kesatu  
Fleksibilitas Anggaran**

**Pasal 24**

Anggaran belanja BLUD RSUD dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (fleksibel budget) sepanjang pendapatan berkaitan bertambah





atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.

#### **Pasal 25**

- (1) Fleksibel anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Fleksibel anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4) Persentase ambang batas dicantumkan dalam APBD dan DPA.
- (5) Pencantuman persentase batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

#### **Pasal 26**

- (1) Belanja BLUD RSUD dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 24, maksimal sebesar angka ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25.
- (2) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD selain dari APBD/ APBN.
- (3) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah plafon anggaran per jenis.

#### **Pasal 27**

- (1) Belanja BLUD RSUD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang terjadi sebelum penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD perubahan.
- (2) Belanja BLUD RSUD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang terjadi sesudah penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dalam laporan keuangan tahunan BLUD RSUD.

/				
---	--	--	--	--

**Bagian Kedua**  
**Perubahan RBA**

**Pasal 28**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan efektif dan segera, BLUD RSUD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
  - b. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa pergeseran antara rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan;
  - c. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, atas izin Dewan Pengawasan BLUD dan melaporkannya kepada BKD pada kesempatan awal; dan
  - d. mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), mengikuti prosedur perubahan APBD.

  
\_\_\_\_\_

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati mulai ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI LAMANDAU,






  
**M A R U K A N**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 573

BAGIAN BUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

**LAMPIRANI  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,  
PENGAJUAN, PENETAPAN DAN  
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN  
ANGGARAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH LAMANDAU.**

**PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA**

.....

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD LAMANDAU  
KABUPATEN LAMANDAU**

**RENCANA BISNIS  
DAN ANGGARAN  
( R B A )**

**TAHUN 20xx**



**KATA PENGANTAR**

*(memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh Pemimpin BLUD).*

Nanga Bulik, ..... 20xx

Pemimpin BLUD

.....

.....



**RINGKASAN EKSEKUTIF**

*(memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun).*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	
A. GAMBARAN UMUM .....	
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	
C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS .....	
<b>BAB II. KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 2013</b> .....	
A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA .....	
1. Faktor Internal .....	
2. Faktor Eksternal .....	
B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI .....	
1. Aspek Mikro .....	
2. Aspek Makro .....	
C. PENCAPAIAN KINERJA .....	
1. Non Keuangan .....	
2. Keuangan .....	
a. Realisasi Pendapatan .....	
1) Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan .....	
2) Realisasi Total Pendapatan .....	
b. Realisasi biaya .....	
1) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit layanan .....	
2) Realisasi Total Biaya .....	
c. Pencapaian Program Investasi dan Pendanaan .....	
1) Investasi .....	
2) Pendanaan .....	
D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20xx .....	
1. Neraca .....	
2. Laporan Operasional .....	
3. Laporan Arus Kas .....	

4. Catatan atas Laporan Keuangan .....

**BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 20xx .....**

A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI .....

1. Faktor Internal .....

2. Faktor Eksternal .....

B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN .....

1. Aspek Makro.....

2. Aspek Mikro.....

C. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN .....

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN .....

1. Program.....

2. Kegiatan.....

E. PERKIRAAN PENDAPATAN .....

1. Pendapatan BLUD .....

2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit .....

F. PERKIRAAN BIAYA .....

1. Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan.....

2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional .....

3. Biaya berdasarkan Komponen dan Anggarannya .....

G. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INVESTASI .....

1. Perkiraan Penerimaan Investasi .....

2. Pengeluaran Investasi .....

H. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDANAAN .....

1. Perkiraan Penerimaan Pendanaan .....

2. Pengeluaran Pendanaan .....

I. ANGGARAN BLUD .....

1. Anggaran Pendapatan BLUD berdasarkan Sumber Pendapatan (Basis AkruaI) .....

2. Anggaran Biaya (Basis AkruaI).....

3. Anggaran Pendapatan (Basis Kas) .....

4. Anggaran Belanja (Basis Kas) .....

5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi (Basis Kas) .....

6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan .....

J. AMBANG BATAS RBA .....



**BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20xx** .....

A. NERACA .....

B. LAPORAN OPERASIONAL .....

C. LAPORAN ARUS KAS .....

D. CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN .....

**BAB V. PENUTUP** .....

A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM IMPLEMENTASI  
KEGIATAN BLUD .....

B. KESIMPULAN .....

**LAMPIRAN** .....

RINGKASAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK KONSOLIDASI DENGAN APBD/RKA-  
SKPD .....

**PENDAHULUAN**

**BABI**

**A. GAMBARAN UMUM**

*(bertitikterangan ringkas mengenai eksistensi, perkembangan RS dan kegiatan pokok BLUD).*

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

*(memuat maksud dan tujuan penerapan PPK- BLUD di RS).*

**C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS**

*(memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan Dewas).*

## BAB II

### KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 20xx

#### A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

*(memuat gambaran mengenai hasil kegiatan tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja).*

.....

.....

##### 1. Faktor Internal

*(Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:*

- *pelayanan;*
  - *keuangan;*
  - *organisasi dan sumber daya manusia;*
  - *sarana dan prasarana)*
- .....
- .....

##### a. Pelayanan Medis

###### 1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

###### 2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

## **b. Organisasi dan SDM**

### 1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

### 2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

## **c. Keuangan**

### 1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

### 2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).



**d. Sarana dan Prasarana**

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

**2. Faktor Eksternal**

*(Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan:*

- *peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;*
- *kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;*
- *perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;*
- *perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;*
- *keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis;*
- *keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.)*

**a. UU dan PP yang terkait dengan BLU**

.....  
.....

**b. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk RS**

.....  
.....

**c. Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat**

.....  
.....

**d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi**

.....  
.....

e. Status sebagai RSD

.....  
.....

f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan

.....  
.....

g. Globalisasi Ekonomi

.....  
.....

h. Ancaman Bencana Nasional

.....  
.....

i. Kebijakan pemerintah tentang SDM/PNS

.....  
.....

j. Perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran

.....  
.....

**B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI**

**1. Aspek Makro**

NO.	INDIKATOR EKONOMI	ASUMSI 2013	FAKTA YANG TERJADI
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)		
2.	Tingkat Inflasi (%)		
3.	Pertumbuhan Pasar (%)		
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)		
5.	Kurs 1 US\$ (Rp)		
6.	Dst.....		

*(Memuat uraian tentang kondisi BLUD dalam konteks indikator ekonomi daerah setempat).*

**2. Aspek Mikro**

NO.	INDIKATOR	ASUMSI 2013	FAKTA YANG TERJADI
1.	Pembiayaan public sebagai fungsi PSO		
2.	Perubahan tarif layanan		
3.	Pengembangan produk baru		
4.	Peningkatan volume layanan		
5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan		
6.	Dst.....		

(Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan)

### C. PENCAPAIAN KINERJA

#### 1. Non Keuangan

##### a. Kegiatan Pelayanan (berdasarkan unit)

No.	UNIT PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TH. 2013			KET (%)
			Target	Realisasi (s/d bin..)	Prognosa	
1	Instalasi Gawat Darurat					
2	Instalasi Rawat Jalan					
3	Instalasi Rawat Inap					
4	Instalasi Rawat Intensif					
5	Instalasi Bedah Sentral					
6	Instalasi Laboratorium					
7	Instalasi Radiologi					
8	Instalasi Rehab.Medik					
9	Inst.Ked Forensik & ML					
10	Instalasi Farmasi					
11	Instalasi CSSD					
12	Instalasi Sanitasi					
13	Instalasi IPSRS					
14	Instalasi Gizi					
15	Pelayanan Fungsional Lainnya					
	Jumlah					

Catatan : jika data per unit layanan belum dimiliki, data kinerja keuangan dapat dibuat seperti berikut ini

##### b. Pelayanan (berdasarkan kelompok)

NO.	KEL. PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TH. 20xx			KET (%)
			Target	Realisasi (S/D Bln..)	Prognosa	
1	Kunjungan Rwt Jalan					
2	Kunjungan IGD					
3	Pasien Rawat Inap					
4	BOR					
5	LOS					
6	TOI					
7	D s t...					

Catatan:

1. Kinerja non keuangan dapat pula dilihat dari perspektif Balance Scorecard, yaitu dengan menyampaikan data pencapaian kinerja dilihat dari perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan/pembelajaran SDM.
2. Selain dengan perspektif balance scorecard, kinerja non keuangan dapat juga disampaikan dari sasaran dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk masing-masing unit pelayanan.

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....  
.....

## 2. Keuangan

memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran, sekurang-kurangnya meliputi:

- pendapatan;
- biaya;
- investasi;
- pendanaan; dan
- analisis keuangan lainnya, seperti:
  - likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas;
  - solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset;
  - aktivitas meliputi perputaran aset, perputaran piutang, perputaran persediaan;
  - rentabilitas meliputi pendapatan operasional dibagi biaya operasional (POBO), rasio proporsi pendapatan;
  - produktivitas (hasil produksi setiap unit pelayanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah);
  - efisiensi (output dibandingkan input)

### a. Realisasi Pendapatan

NO	UNIT PELAYANAN	PENDAPATAN TAHUN 20xx			Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi (s/d bulan.....)	Prognosa	
1	<b>UNIT PELAYANAN</b>				
a.	Instalasi Gawat Darurat				
b.	Instalasi Rawat Jalan				
c.	Instalasi Rawat Inap				
d.	Instalasi Rawat Intensif				
e.	Instalasi Bedah Sentral				
f.	Instalasi Laboratorium				
g.	Instalasi Radiologi				
h.	Instalasi Rehabilitasi Medik				
i.	Instalasi Ked Forensik & ML				
j.	Instalasi Farmasi				
k.	Instalasi CSSD				
l.	Instalasi Sanitasi				
m.	Instalasi IPSRS				



n.	Instalasi Gizi			
o.	dst.....			
<b>2</b>	<b>UNIT PENDUKUNG PELAYANAN</b>			
a.	Unit Kerja Akuntansi			
b.	Unit Kerja Keuangan/Anggaran			
c.	Unit Kerja Sekretariat			
d.	Unit Kerja Diklat			
e.	Unit Kerja Pelayanan			
f.	Unit Kerja Penunjang			
g.	Unit Kerja Kepegawaian			
h.	Unit Kerja Keperawatan			
i.	.....			
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>			

**b. Realisasi Biaya**

**1) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan**

NO	UNIT PELAYANAN	BIAYA TAHUN 20xx			Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi (s/d bulan.....)	Prognosa	
<b>1</b>	<b>UNIT PELAYANAN</b>				
a.	Instalasi Gawat Darurat				
b.	Instalasi Rawat Jalan				
c.	Instalasi Rawat Inap				
d.	Instalasi Rawat Intensif				
e.	Instalasi Bedah Sentral				
f.	Instalasi Laboratorium				
g.	Instalasi Radiologi				
h.	Instalasi Rehabilitasi Medik				
i.	Instalasi Ked Forensik & ML				
j.	Instalasi Farmasi				
k.	Instalasi CSSD				
l.	Instalasi Sanitasi				
m.	Instalasi IPSRS				
n.	Instalasi Gizi				
o.	dst.....				
<b>2</b>	<b>UNIT PENDUKUNG PELAYANAN</b>				
a.	Unit Kerja Akuntansi				
b.	Unit Kerja Keuangan/Anggaran				
c.	Unit Kerja Sekretariat				
d.	Unit Kerja Diklat				

e.	Unit Kerja Pelayanan				
f.	Unit Kerja Penunjang				
g.	Unit Kerja Kepegawaian				
h.	Unit Kerja Keperawatan				
i.	.....				
<b>JUMLAH</b>					

**Catatan :** Apabila sistem informasi keuangan belum memungkinkan mengemukakan data seperti pada tabel diatas (biaya berdasarkan jenis layanan), maka minimal dapat mengemukakan data biaya seperti pada tabel dibawah ini (sesuai RBA).

## 2) Realisasi Total Biaya

Komponen Biaya	Anggaran Thn 20xx	Realisasi sld .....	Prognosa Thn 20xx	Capaian	Ket
1	2	3	4	5 =(4)/(2)	6
<b>A. Biaya Pelayanan</b>					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya bahan <sup>1</sup>					
3. Biaya jasa pelayanan					
4. Biaya pemeliharaan					
5. Biaya barang dan jasa					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya pelayanan lainnya					
<b>B. Biaya Umum Dan Administrasi</b>					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya administrasi kantor					
3. Biaya pemeliharaan					
4. Biaya barang dan jasa					
5. Biaya promosi					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.					
<b>C. Biaya Non Operasional</b>					
1. Biaya bunga					
2. Biaya administrasi bank					
3. Kerugian penjualan aset					
4. Kerugian penurunan nilai					
5. Biaya non operasional lainnya					
<b>Jumlah Biaya (A+B+C)</b>					

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....

.....

<sup>1</sup> Termasuk harga pokok barang yang dijual.

**c. Pencapaian Program Investasi dan Pendanaan**

**1) Investasi**

No	Jenis Investasi	Anggaran Th. 20xx	Realisasi s.d .....	Capaian (%)	Ket
1.	<b>Pelepasan aset</b>				
a.	Kendaraan				
b.	Mesin				
c.	Dst .....				
2.	<b>Pencairan investasi</b>				
a.	Pencairan deposito				
b.	Penjualan surat berharga				
c.	Dst .....				
	<b>Jumlah</b>				

*Penjelasan Pencapaian Kinerja :*

.....  
.....

### Pengeluaran Investasi

No	Jenis Investasi	SUMBER DANA, ANGGARAN, DAN REALISASI														Capaian (%)	Ket
		Jasalayanan		Hibah		Kerjasama		APBD		APBN		Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		Jumlah			
		Anggaran Th 20xx	Realisasi Sd...	Anggaran Th 20xx	Realisasi Sd...	Anggaran Th 20xx	Realisasi Sd ..	Anggaran Th 20xx	Realisasi Sd ...	Anggaran Th 20xx	Realisasi Sd..	Anggaran Th 20xx	Realisasi Sd ...				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Tanah																
2.	Peralatan dan mesin																
3.	Gedung dan bangunan																
4.	Kendaraan																
5.	Perlengkapan dan peralatan kantor																
6.	Jalan, irigasi, dan jaringan																
7.	Aset sewa guna usaha																
8.	Surat utang <sup>2</sup> dan surat modal <sup>3</sup> .																
9.	Deposito jangka waktu lebih dari 12 bulan																
10.	Sistem Informasi																
11.	Dst.....																
	<b>Jumlah</b>																

<sup>2</sup> Contoh surat utang: SUN (Surat Utang Negara), pembelian obligasi, SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

<sup>3</sup> Contoh surat modal: Saham



Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....  
.....

## 2) Pendanaan

### a) Penerimaan Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20xx	Realisasi s.d.....	Capaian (%)	Ket
1.	Penarikan Pinjaman dari ....				
2	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....  
.....

### b) Pengeluaran Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20xx	Realisasi s.d.....	Capaian (%)	Ket
1.	Pembayaran utang kepada.....				
2	Dst.....				

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....  
.....

## D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 20xx

### 1. NERACA

#### NERACA PER 31 DESEMBER 20xx

KOMPONEN	ANGGARAN 20xx	REALISASI s/d 30 Juni	PROGNOSA TH. 20xx	SELISIH %
<b>I ASET</b>				
<b>A Aset Lancar</b>				
1) Kas dan Setara Kas				
2) Investasi jk. Pendek				
3) Piutang Usaha				

4) Piutang Lain-lain				
5) Persediaan				
6) Uang Muka				
7) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima				
8) Dst.....				
<b>Jumlah Aset Lancar</b>				
<b>B Investasi Jangka Panjang</b>				
<b>C Aset Tetap</b>				
1) Tanah				
2) Bangunan & Gedung				
3) Peralatan & Mesin				
4) Kendaraan				
5) Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
6) Jalan, irigasi dan peralatan kantor				
7) Dst.....				
<b>Jumlah Aset Tetap</b>				
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>				
<b>D Aset Lain-Lain</b>				
1) Aset tak berwujud				
2) Konstruksi dalam pengerjaan				
5) Dst.....				
<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>				
<b>JUMLAH ASET ( A + B + C+D )</b>				
<b>II KEWAJIBAN</b>				
<b>A Kewajiban Jangka Pendek</b>				
1) Hutang Usaha				
2) Hutang Pajak				
3) Biaya Yang Masih Harus				

Dibayar				
4) Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
5) Pendapatan yang Diterima Dimuka				
6) Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>				
<b>B Kewajiban Jangka Panjang</b>				
1) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun				
2) Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>				
<b>JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)</b>				
<b>III EKUITAS</b>				
1) Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas Awal				
b. Surplus (deficit) sampai dengan periode tahun lalu				
c. Surplus (defisit) tahun berjalan				
2) Terikat Permanen				
3) Terikat Kontemporer				
4) Hibah				
5) Donasi				
6) Dst.....				
<b>Jumlah Ekuitas</b>				
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (II+III)</b>				

## 2. LAPORAN OPERASIONAL

### LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 20xx

No.	KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI	PROGNOSA	SELISIH
		TH. 20xx	s/d 30 Juni	TH. 20xx	%
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN BLUD</b>				
	1) Jasa Layanan				
	2) Hibah				
	3) Hasil Kerjasama				
	4) Pendapatan dari APBD				
	5) Pendapatan dari APBN				
	6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>B</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
	1) Biaya Pelayanan				
	2) Biaya Umum dan Administrasi				
	<b>JUMLAH BIAYA OPERASIONAL (1+2)</b>				
	<b>SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BIAYA OPERASIONAL (A-B)</b>				
<b>C</b>	<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>D</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>				
	<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN</b>				
	<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS-POS LUAR BIASA</b>				
	1) Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa				
	2) Biaya dari Kejadian Luar Biasa				
	<b>SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN BERSIH</b>				

### 3. LAPORAN ARUS KAS

#### LAPORAN ARUS KAS TAHUN 20xx (Metode langsung)

No.	KOMPONEN	ANGGARAN TH. 20xx	REALISASI s/d 30 Juni (Rp)	PROGNOSA TH. 20xx	SELISIH %
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>					
<b>A OPERASIONAL</b>					
	<b>Arus Masuk</b>				
	1 Jasa Layanan				
	2 Hibah				
	3 Hasil Kerjasama				
	4 Pendapatan dari APBD				
	5 Pendapatan dari APBN				
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang				
	6 Sah				
	<b>Arus Keluar</b>				
	1 Biaya Pelayanan				
	2 Biaya Umum dan Administrasi				
	3 Biaya Lain-lain				
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>					
<b>B INVESTASI</b>					
	<b>Arus Masuk</b>				
	1 Hasil Penjualan Aset Tetap				
	2 Hasil Investasi				
	3 Dst .....				
	<b>Arus Keluar</b>				
	1 Perolehan Aset Tetap				
	2 Pembelian Investasi				
	3 Perolehan Aset Lainnya				
	4 Dst .....				
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</b>				

Investasi				
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>				
<b>C PENDANAAN</b>				
1 Penerimaan Pinjaman dari ....				
2 Dst. ....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1 Pembayaran pinjaman kepada ....				
2 Dst. ....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

**LAPORAN ARUS KAS  
TAHUN 20xx  
(Metode tidak langsung)**

No.	KOMPONEN	ANGGARAN TH. 20xx	REALISASI s/d 30 Juni	PROGNOSA TH. 20xx	SELISIH %
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>					
<b>A</b>	<b>OPERASIONAL</b>				
1	Surplus (defisit) Tahun Berjalan				
2	Penyesuaian ke Dasar Kas				
	a Biaya Penyusutan dan Amortisasi				
	b Kerugian Penurunan Nilai				
	c Pembayaran bunga				
	d Dst. ....				
3	Perubahan Aset Lancar				
	a Investasi Jangka Pendek				
	b Piutang Usaha				
	c Piutang Lain-lain				
	d Persediaan				
	e Uang Muka Pendapatan yang Masih Harus Diterima				
4	Perubahan Kewajiban Jangka				



Pendek a Hutang Usaha b Hutang Pajak c Biaya yang Masih Harus Dibayar Hutang Jk. Pjg. yg Jatuh Tempo d dalam 1 th e Pendapatan yang Diterima di Muka f Utang Jangka Pendek Lainnya <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>				
<b>B INVESTASI</b>				
<b>Arus Masuk</b> 1 Hasil Penjualan Aset Tetap 2 Hasil Investasi 3 Dst. .... <b>Arus Kas Keluar</b> 1 Perolehan Aset 2 Pembelian Investasi 3 Perolehan Aset Lainnya 4 Dst. .... <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>				
<b>C PENDANAAN</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b> 1 Penerimaan Pinjaman dari ..... 2 Dst. .... <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>  <b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal</b>  <b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

#### 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Dijelaskan hal-hal yang ada relevansinya dengan laporan keuangan, antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Umum
- b. Kebijakan Akuntansi
- c. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan
- d. dan hal-hal lain yang dipandang perlu

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal ..... Dan Periode.....

**a. Umum**

.....  
.....

**b. Kebijakan Akuntansi** *(mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku)*

.....  
.....

**c. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.**

*(Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha).*

**1) Kas dan setara kas, terdiri dari :**

Uraian	Anggaran Thn.20xx	Realisasi s.d ..... .....	Prognosa	Selisih (%)
Kas di bendahara penerimaan				
Giro Bank .....				
Tabungan Bank ...				
Deposito Bank .....				
Jumlah				

**2) Piutang usaha, terdiri dari :**

Uraian	Anggaran Thn.20xx	Realisasi s.d ..... .....	Prognosa	Selisih (%)
Piutang kepada .....				
Piutang kepada .....				
Jumlah				

**d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.**

## BAB III

### RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 20xx

#### A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI

##### 1. Faktor Internal

*(memuat gambaran mengenai hasil kegiatan tahun yang akan datang secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja).*

.....

.....

##### a. Kondisi Pelayanan

*(Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:*

- *pelayanan;*
  - *keuangan;*
  - *organisasi dan sumber daya manusia;*
  - *sarana dan prasarana)*
- .....
- .....

##### 1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

##### 2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

## **2. Organisasi dan SDM**

### **1). Kekuatan**

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

### **2). Kelemahan**

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

## **3. Keuangan**

### **1). Kekuatan**

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

### **2). Kelemahan**

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

**4. Sarana dan Prasarana**

1). Kekuatan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

2). Kelemahan

- a).
- b).
- c).
- d).
- e).
- f).

**2. Faktor Eksternal**

**a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait**

.....  
.....

**b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO).**

.....  
.....

**c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SDM/PNS**

.....  
.....

**d. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat**

.....  
.....

e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

.....  
.....

f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan yang sejenis

.....  
.....

g. Keadaan persaingan dengan industri yang sejenis

.....  
.....

h. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional

.....  
.....

i. Perkembangan teknologi peralatan kedokteran

.....  
.....

## B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN

### 1. ASPEK MAKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 20xx	PROGNOSA 20xx	Ket
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2.	Tingkat Inflasi (%)			
3.	Pertumbuhan Pasar (%)			
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)			
5.	Kurs 1 US\$ (Rp)			
6.	Dst.....			

(Memuat uraian tentang kondisi BLUD dalam konteks indikator ekonomi daerah setempat).



## 2 ASPEK MIKRO

NO.	UNSUR	ASUMSI 20xx	PROGNOSA 20xx	Ket
1.	Pembiayaan public sebagai fungsi PSO			
2.	Perubahan tarif layanan			
3.	Pengembangan produk baru			
4.	Peningkatan volume layanan			
5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan			
6.	Dst.....			

(Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan)

## C. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

### 1. a. Pelayanan (berdasarkan unit pelayanan)

NO	UNIT LAYANAN	SASARAN	INDIKATOR (SESUAI SPM)	TARGET	KEGIATAN
1	Kunjungan Rawat Jalan				
2	Kunjungan IGD				
3	Pasien Rawat Inap				
4	BOR				
5	LOS				
6	TOI				
7	dst...				

### 1. b. Pelayanan (berdasarkan unit pelayanan)

NO	UNIT LAYANAN	SASARAN	INDIKATOR (SESUAI SPM)	TARGET	KEGIATAN
1	Instalasi Gawat Darurat				
2	Instalasi Rawat Jalan				
3	Instalasi Rawat Inap				
4	Instalasi Rawat Intensif				
5	Instalasi Bedah Sentral				
6	Instalasi Laboratorium				
7	Instalasi Radiologi				
8	Instalasi Rehabilitasi Medik				
9	Instalasi Ked Forensik & ML				
10	Instalasi Farmasi				
11	Pelayanan Fungsional				

	Lainnya				
12	Instalasi CSSD				
13	Instalasi Sanitasi				
14	Instalasi IPSRS				
15	Instalasi Gizi				
16	Dst.....				

## 2. Pendukung Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR <sup>4</sup>	TARGET	KEGIATAN
1	Unit Kerja Akuntansi				
2	Unit Kerja Keuangan/Anggaran				
3	Unit Kerja Sekretariat				
4	Unit Kerja Diklat				
5	Unit Kerja Pelayanan				
6	Unit Kerja Penunjang				
7	Unit Kerja Kepegawaian				
8	Unit Kerja Keperawatan				
9	Dst.....				

## D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

### a. Program

Peningkatan Pelayanan BLUD

### b. Kegiatan

Pelayanan, terdiri dari :

- 1) Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Jalan
- 2) Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Inap
- 3) Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Intensif
- 4) Meningkatkan Mutu Layanan Bedah Sentral
- 5) Meningkatkan Mutu Layanan Laboratorium
- 6) Meningkatkan Mutu Layanan Radiologi
- 7) Meningkatkan Mutu Layanan Rehabilitasi Medik
- 8) Meningkatkan Mutu Layanan Pelayanan Kedokteran Forensik dan Mediko Legal
- 9) Meningkatkan Mutu Layanan Farmasi
- 10) Meningkatkan Mutu Layanan CSSD
- 11) Meningkatkan Mutu Layanan Sanitasi
- 12) Meningkatkan Mutu Layanan IPSRS
- 13) dst.....

<sup>4</sup> Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal.

## E. PERKIRAAN PENDAPATAN

### 1. Pendapatan BLUD

NO.	SUMBER PENDAPATAN	PROGNOSA TH. 20xx	PERKIRAAN TH. 20xx
1	Jasa Pelayanan		
2	Hibah		
3	Kerjasama		
4	APBD		
5	APBN		
6	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	<b>Jumlah</b>		

### 2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit

NO.	UNIT LAYANAN	PROGNOSA TH. 20xx	PERKIRAAN TH. 20xx
1	Layanan Rawat Jalan		
2	Layanan Rawat Inap		
3	Layanan Rawat Intensif		
4	Layanan Bedah Sentral		
5	Layanan Laboratorium		
6	Layanan Radiologi		
7	Layanan Rehabilitasi Medik		
8	Layanan Pelayanan Kedokteran Forensik dan Mediko Legal		
9	Layanan Farmasi		
10	Layanan CSSD		
11	Layanan Sanitasi		
12	Layanan IPSRS		
13	Dst.....		
	<b>Jumlah Pendapatan Pelayanan</b>		
1	Unit Kerja Akuntansi		
2	Unit Kerja Keuangan/Anggaran		
3	Unit Kerja Sekretariat		
4	Unit Kerja Diklat		
5	Unit Kerja Pelayanan		
6	Unit Kerja Penunjang		
7	Unit Kerja Kepegawaian		
8	Unit Kerja Keperawatan		
9	Dst.....		
	<b>Jumlah Pendapatan Pendukung Pelayanan</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN JASA LAYANAN</b>		

Penjelasan Pencapaian Kinerja :

.....

.....

## F. PERKIRAAN BIAYA

(Perkiraan biaya BLUD berasal dari biaya kegiatan masing-masing unit layanan, jumlah unit layanan disesuaikan dengan kondisi masing-masing BLUD, contoh berikut ini adalah biaya untuk unit layanan IGD):

### 1. Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan

#### Contoh (1): Unit Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Program : Peningkatan Pelayanan				
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat				
Indikator	Tolok ukur kinerja		Target kinerja	
Input	1. SDM 2. Sarana/Prasaana Alat 3. BHP 4. Biaya			
Output	1. Pelayanan Kunjungan Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus Elektromedik 2. Keuangan Administrasi/Karcis Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus Elektromedik			
Outcome	..... ..... (Dapat diisi dengan target pencapaian SPM)			
ANGGARAN BELANJA				
KOMPONEN BIAYA	RINCIAN BIAYA (Satuan X Harga)			JUMLAH ANGGARAN (RP)
	Jml	Satuan	Harga Satuan	
I. Biaya Pelayanan				
A. Biaya Pegawai				
.....				
B. Biaya Bahan				
.....				
C. Biaya Jasa Pelayanan				
.....				
D. Biaya Pemeliharaan				
.....				

E. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
F. Biaya Depresiasi				
.....				
G. Biaya Pelayanan Lainnya				
.....				
<b>II. Biaya Umum dan Administrasi</b>				
A. Biaya Pegawai				
.....				
B. Biaya Administrasi Kantor				
.....				
C. Biaya Pemeliharaan				
.....				
D. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
E. Biaya Promosi				
.....				
F. Biaya depresiasi				
.....				
G. Biaya Umum dan Adm lainnya				
.....				
<b>III. Biaya Non Operasional</b>				
A. Biaya Bunga				
.....				
B. Biaya Administrasi Bank				
.....				
C. Biaya Kerugian penjualan aset tetap				
.....				
D. Biaya Kerugian penurunan nilai Kurs				
.....				
E. Biaya Non Operasional lainnya				
.....				
<b>Jumlah Biaya (I+II+III)</b>				

**Contoh (2) : Unit Pelayanan Instalasi Laboratorium**

Program : Peningkatan Pelayanan		
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Laboratorium		
Indikator	Tolok ukur kinerja	Target kinerja
Input	1. SDM 2. Sarana/Prasaana Alat 3. BHP 4. Biaya	
Output	1. Pelayanan a. Pemeriksaan Patologi Klinik b. Pemeriksaan Patologi Anatomi c. Pemeriksaan Parasitologi Klinik	

	d. Pemeriksaan Mikrobiologi			
	2. Keuangan a. Pemeriksaan Patologi Klinik b. Pemeriksaan Patologi Anatomi c. Pemeriksaan Parasitologi Klinik d. Pemeriksaan Mikrobiologi			
Outcome	..... ..... (Dapat diisi dengan target pencapaian SPM)			
<b>ANGGARAN BELANJA</b>				
KOMPONEN BIAYA	RINCIAN BIAYA (satuan x harga)			JUMLAH ANGGARAN (RP)
	Jml	Satuan	Harga Satuan	
<b>I. Biaya Pelayanan</b>				
A. Biaya Pegawai .....				
B. Biaya Bahan .....				
C. Biaya Jasa Pelayanan .....				
D. Biaya Pemeliharaan .....				
E. Biaya Barang dan Jasa .....				
F. Biaya Depresiasi .....				
G. Biaya Pelayanan Lainnya .....				
<b>II. Biaya Umum dan Administrasi</b>				
A. Biaya Pegawai .....				
B. Biaya Administrasi Kantor .....				
C. Biaya Pemeliharaan .....				
D. Biaya Barang dan Jasa .....				
E. Biaya Promosi .....				
F. Biaya depresiasi .....				
G. Biaya Umum dan Adm. lainnya .....				
<b>III. Biaya Non Operasional</b>				
A. Biaya Bunga .....				
B. Biaya Administrasi Bank .....				



C. Biaya Kerugian penjualan aset tetap				
.....				
D. Biaya Kerugian penurunan nilai Kurs				
.....				
E. Biaya Non Operasional lainnya				
.....				
<b>Jumlah Biaya (I+II+III)</b>				

**Contoh (3): Unit Pelayanan Instalasi CSSD**

Program : Peningkatan Pelayanan				
Kegiatan : Pendukung Pelayanan Instalasi CSSD				
Indikator	Tolok ukur kinerja		Target kinerja	
Input	1. SDM 2. Sarana/Prasaana Alat 3. BHP 4. Biaya			
Output	1. Pelayanan a. Laundry b. Jahitan c. Sterilisasi d..... 2. Keuangan a. Laundry b. Jahitan c. Sterilisasi d.....			
Outcome	..... ..... (Dapat diisi dengan target pencapaian SPM)			
ANGGARAN BELANJA				
KOMPONEN BIAYA	RINCIAN BIAYA (Satuan X Harga)			JUMLAH ANGGARAN (RP)
	Jml	Satuan	Harga/satuan	
<b>I. Biaya Pelayanan</b>				
A. Biaya Pegawai				
.....				
B. Biaya Bahan				
.....				
C. Biaya Jasa Pelayanan				
.....				
D. Biaya Pemeliharaan				
.....				
E. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
F. Biaya Depresiasi				

.....				
G. Biaya Pelayanan Lainnya				
.....				
<b>II. Biaya Umum dan Administrasi</b>				
A. Biaya Pegawai				
.....				
B. Biaya Administrasi Kantor				
.....				
C. Biaya Pemeliharaan				
.....				
D. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
E. Biaya Promosi				
.....				
F. Biaya Depresiasi				
.....				
G. Biaya Umum dan Adm. lainnya				
.....				
<b>III. Biaya Non Operasional</b>				
A. Biaya Bunga				
.....				
B. Biaya Administrasi Bank				
.....				
C. Biaya Kerugian penjualan aset tetap				
.....				
D. Biaya Kerugian penurunan nilai Kurs				
.....				
E. Biaya Non Operasional lainnya				
.....				
<b>Jumlah Biaya (I+II+III)</b>				

**Contoh (4) : Unit Kerja Akuntansi**

Program : Peningkatan Pelayanan		
Kegiatan : Pendukung Pelayanan		
Indikator	Tolok ukur kinerja	Target kinerja
Input	1. SDM 2. Sarana/Prasaana Alat 3. BHP 4. Biaya	
Output	1. Pelayanan a. Laporan Keuangan b. Periodik	
Outcome	..... ..... (Dapat diisi dengan target pencapaian SPM)	

ANGGARAN BELANJA				
KOMPONEN BIAYA	RINCIAN BIAYA (Satuan X Harga)			JUMLAH ANGGARAN (RP)
	Jml	Satuan	Harga/satuan	
<b>I. Biaya Pelayanan</b>				
A. Biaya Pegawai				
.....				
B. Biaya Bahan				
.....				
C. Biaya Jasa Pelayanan				
.....				
D. Biaya Pemeliharaan				
.....				
E. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
F. Biaya Depresiasi				
.....				
G. Biaya Pelayanan Lainnya				
.....				
<b>II. Biaya Umum dan Administrasi</b>				
A. Biaya Pegawai				
.....				
B. Biaya Administrasi Kantor				
.....				
C. Biaya Pemeliharaan				
.....				
D. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
E. Biaya Promosi				
.....				
F. Biaya Depresiasi				
.....				
G. Biaya Umum dan Adm. lainnya				
.....				
<b>III. Biaya Non Operasional</b>				
A. Biaya Bunga				
.....				
B. Biaya Administrasi Bank				
.....				
C. Biaya Kerugian penjualan aset tetap				
.....				
D. Biaya Kerugian penurunan nilai Kurs				
.....				
E. Biaya Non Operasional lainnya				
.....				
<b>Jumlah Biaya (I+II+III)</b>				

## 2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional

No	UNIT KERJA/PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL		BIAYA NON OPERASIONAL	JUMLAH
		Biaya Pelayanan	Biaya Umum & Admin.		
<b>1</b>	<b>UNIT PELAYANAN</b>				
a.	Instalasi Gawat Darurat				
b.	Instalasi Rawat Jalan				
c.	Instalasi Rawat Inap				
d.	Instalasi Rawat Intensif				
e.	Instalasi Bedah Sentral				
f.	Instalasi Laboratorium				
g.	Instalasi Radiologi				
h.	Instalasi Rehabilitasi Medik				
i.	Instalasi Ked Forensik & ML				
j.	Instalasi Farmasi				
k.	Instalasi CSSD				
l.	Instalasi Sanitasi				
m.	Instalasi IPSRS				
n.	Instalasi Gizi				
o.	Dst.....				
<b>2</b>	<b>UNIT PENDUKUNG PELAYANAN</b>				
a	Unit Kerja Akuntansi				
b	Unit Kerja Keuangan/Anggaran				
c	Unit Kerja Sekretariat				
d	Unit Kerja Diklat				
e	Unit Kerja Pelayanan				
f	Unit Kerja Penunjang				
g	Unit Kerja Kepegawaian				
h	Unit Kerja Keperawatan				
i	Dst.....				
	<b>TOTAL BIAYA</b>				

## 3. Biaya Berdasarkan Komponen dan Anggarannya

(Dalam hal terdapat kesulitan untuk pengelompokan biaya pada setiap unit layanan, dapat menggunakan format sebagai berikut) :

KOMPONEN BIAYA	JUMLAH ANGGARAN (RP)
<b>I. Biaya Operasional</b>	
<b>A. Biaya Pelayanan</b>	
1. Biaya Pegawai	
2. Biaya Bahan	
3. Biaya Jasa Pelayanan	
4. Biaya Pemeliharaan	
5. Biaya Barang dan Jasa	
6. Biaya Depresiasi dan Amortisasi	
7. Biaya Pelayanan Lainnya	
<b>B. Biaya Umum dan Administrasi</b>	

1. Biaya Pegawai	
2. Biaya Administrasi Kantor	
3. Biaya Pemeliharaan	
4. Biaya Barang dan Jasa	
5. Biaya Promosi	
6. Biaya Depresiasi dan Amortisasi	
7. Biaya Umum dan Adm. lainnya	
<b>II. Biaya Non Operasional</b>	
1. Biaya Bunga	
2. Biaya Administrasi Bank	
3. Biaya pelepasan aset tetap	
4. Kerugian penurunan nilai Kurs	
5. Biaya Non Operasional lainnya	
<b>Jumlah Biaya (I+II)</b>	

**G. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN INVESTASI**

**1. Perkiraan Penerimaan Investasi**

NO	JENIS INVESTASI	PROGNOSA TH.20xx	PERKIRAAN TH. 20xx	KET
1.	<b>Pelepasan aset</b>			
a	Kendaraan			
b	Mesin			
c	Dst.....			
2.	<b>Pencairan investasi</b>			
a	Pencairan deposito			
b	Penjualan surat berharga			
c	Dst.....			
	<b>Jumlah</b>			

**2. Pengeluaran Investasi**

Komponen Pengeluaran Investasi	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pembelian tanah				
.....				
.....				
2. Pembelian peralatan dan mesin				
.....				
.....				
3. Pembangunan gedung dan bangunan				
.....				
.....				
4. Pembelian kendaraan				

.....				
.....				
5. Pembelian Peralatan Kantor				
.....				
.....				
6. Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
.....				
.....				
7. Pembelian surat berharga jangka panjang				
.....				
.....				
8. Pembangunan/ pengembangan Sistem Informasi				
.....				
.....				
9. Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya				
.....				
.....				
<b>Jumlah Pengeluaran Investasi</b>				

## H. PERKIRAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDANAAN

### 1. Perkiraan Penerimaan Pendanaan

NO	JENIS PENDANAAN	PROGNOSA TH.20xx	PERKIRAAN TH.20xx	KET
1.	Penarikan Pinjaman dari ....			
2.	Dst.....			
	<b>Jumlah</b>			

### 2. Pengeluaran Pendanaan

Komponen Pengeluaran Pendanaan	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pengeluaran pembayaran hutang				
a. Pokok.....				
b. bunga dan administrasi...				
c. Komisi, provisi, denda .....				
2. Dst .....				
.....				
<b>Jumlah</b>				

## I. ANGGARAN BLUD

(Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD).

### 1. Anggaran Pendapatan BLUD Berdasarkan Sumber Pendapatan (Basis Akrual)

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	PROGNOSA TH. 20xx	PROYEKSI TH. 20xx	PERKIRAAN MAJU TH. 20xx	SELISIH (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
1.	Pendapatanjasalayanan				
	a. ....				
	b. ....				
	c. Dst .....				
2.	Hibah				
	a. ....				
	b. ....				
3.	Hasil kerjasama				
	a. Hasil kerjasama dengan .....				
	b. Hasil kerjasama dengan .....				
	c. Dst ..... <sup>5</sup>				
4.	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst .....				
5.	Pendapatan dari APBN				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst .....				
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. keuntungan penjualan aset.				
	b. hasil pemanfaatan kekayaan.				
	c. jasa giro/bunga.				
	d. dividen.				
	e. Dst .....				
	<b>Jumlah</b>				

<sup>5</sup> dimungkinkan ada lampiran tersendiri



## 2. Anggaran Biaya (Basis Akrual)

### a. Anggaran Biaya Berdasarkan Sumber

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
<b>I.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>							
<b>A.</b>	<b>BIAYA PELAYANAN</b>							
<b>1</b>	<b>Biaya Pegawai</b>							
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS							
	1.3. Lembur							
	.....							
<b>2</b>	<b>Biaya Bahan</b>							
	2.1. Biaya Obat							
	2.2. Biaya Alkes							
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium							
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi							
	2.5. Biaya bahan makan pasien							
	.....							
<b>3</b>	<b>Biaya Jasa Pelayanan</b>							
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis							
	3.2. Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis							
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan							
	3.4. Biaya jasa insentif							
	3.5. Biaya jasa pembinaan							
	.....							
<b>4</b>	<b>Biaya Pemeliharaan</b>							
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik							
	.....							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
5	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>							
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien							
	5.2. Biaya cetakan rekam medis							
	.....							
6	<b>Biaya Depresiasi</b>							
	.....							
7	<b>Biaya Pelayanan Lainnya</b>							
	7.1. Biaya Pelayanan lainnya							
	7.2. Biaya							
	.....							
<b>B</b>	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>							
1	<b>Biaya Pegawai</b>							
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS							
	1.3. ....							
	.....							
2	<b>Biaya Adm. Kantor</b>							
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman							
	2.2. Biaya ATK							
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan							
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut							
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor							
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu							
	.....							
3	<b>Biaya pemeliharaan</b>							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan							
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan							
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi							
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi							
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya							
	.....							
<b>4</b>	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>							
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi							
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan							
	4.3. Biaya bahan baker							
	4.4. Biaya gas dapur							
	4.5. Biaya Jasa konsultan dan fihak ketiga lainnya							
	4.6. Biaya langganan listrik, air, telp., faks & Internet							
	4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI							
	4.8. Biaya Langganan Media							
	4.9. Biaya Jasa Kebersihan							
	4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik							
	4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka							
	4.12. Biaya sewa							
	4.13. Biaya representasi							
	.....							
<b>5</b>	<b>Biaya Promosi</b>							
	5.1. Biaya pemasaran dan publikasi							
	5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa							
	.....							
<b>6</b>	<b>Biaya Depresiasi</b>							
	.....							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
7	<b>Biaya Umum dan Administrasi Lainnya</b>							
	7.1. Biaya premi asuransi							
	7.2. Biaya perijinan dan legalisasi							
	7.3. Biaya keamanan dan ketertiban							
	7.4. Biaya jasa sewa .....							
	.....							
<b>II. BIAYA NON OPERASIONAL</b>								
1	<b>Biaya Bunga</b>							
	1.1. Biaya bunga Bank							
	1.2. Biaya bunga deposito							
	1.3. ....							
	.....							
2	<b>Biaya administrasi bank</b>							
	1.1. Biaya administrasi bank							
	1.2. Biaya .....							
	.....							
3	<b>Kerugian pelepasan aset tetap</b>							
	1.1. Biaya kerugian pelepasan aset tetap							
	1.2. ....							
	.....							
4	<b>Kerugian penurunan nilai</b>							
	1.1. Biaya kerugian penurunan nilai							
	1.2. ....							
	.....							
5	<b>Biaya non operasional lainnya</b>							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		PELAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
	1.1. Biaya non operasional lainnya							
	1.2. ....							
	.....							
	<b>TOTAL BIAYA</b>							

**b. Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja**

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20xx			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
<b>I.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
<b>A</b>	<b>BIAYA PELAYANAN</b>				
<b>1</b>	<b>Biaya Pegawai</b>				
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS				
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS				
	1.3. Lembur				
	.....				
<b>2</b>	<b>Biaya Bahan</b>				
	2.1. Biaya Obat				
	2.2. Biaya Alkes				
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium				
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi				
	2.5. Biaya bahan makan pasien				
	.....				
<b>3</b>	<b>Biaya Jasa Pelayanan</b>				
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis				

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20xx			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
	3.2 Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis				
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan				
	3.4. Biaya jasa insentif				
	3.5. Biaya jasa pembinaan				
	.....				
<b>4</b>	<b>Biaya Pemeliharaan</b>				
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik				
	.....				
<b>5</b>	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>				
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien				
	5.2. Biaya cetakan rekam medis				
	.....				
<b>6</b>	<b>Biaya Depresiasi</b>				
	.....				
<b>7</b>	<b>Biaya Pelayanan Lainnya</b>				
	7.1. Biaya Pelayanan lainnya				
	7.2. Biaya				
	.....				
<b>B</b>	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>				
<b>1</b>	<b>Biaya Pegawai</b>				
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS				
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS				
	1.3. ....				
	.....				
<b>2</b>	<b>Biaya Administrasi Kantor</b>				
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman				

No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20xx			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
	2.2. Biaya ATK				
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan				
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut				
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor				
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu				
	.....				
<b>3</b>	<b>Biaya pemeliharaan</b>				
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan				
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan				
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi				
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi				
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya				
	.....				
<b>4</b>	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>				
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi				
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan				
	4.3. Biaya bahan bakar				
	4.4. Biaya gas dapur				
	4.5. Biaya Jasa konsultan dan pihak ketiga lainnya				
	4.6. Biaya langganan listrik, air, telp, faks & Internet				
	4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI				
	4.8. Biaya Langganan Media				
	4.9. Biaya Jasa Kebersihan				
	4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik				
	4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka				
	4.12. Biaya sewa				
	4.13. Biaya representasi				



No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20xx			TOTAL BIAYA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
	.....				
5	<b>Biaya Promosi</b>				
	5.1. Biaya pemasaran dan publikasi				
	5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa				
	.....				
6	<b>Biaya Depresiasi</b>				
	.....				
7	<b>Biaya Umum dan Administrasi Lainnya</b>				
	7.1. Biaya premi asuransi				
	7.2. Biaya perijinan dan legalisasi				
	7.3. Biaya keamanan dan ketertiban				
	7.4. Biaya jasa sewa .....				
	.....				
<b>II. BIAYA NON OPERASIONAL</b>					
1	<b>Biaya Bunga</b>				
	1.1. Biaya bunga Bank				
	1.2. Biaya bunga deposito				
	1.3. ....				
	.....				
2	<b>Biaya administrasi bank</b>				
	2.1. Biaya administrasi bank				
	2.2. Biaya .....				
	.....				
3	<b>Kerugian penjualan aset tetap</b>				
	3.1. Biaya kerugian penjualan aset tetap				
	3.2. ....				



No	JENIS BIAYA	JENIS ANGGARAN TAHUN 20xx			TOTAL BIAYA
		Belanja			
		Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Belanja Modal	
4	Kerugian penurunan nilai				
	4.1. Biaya kerugian penurunan nilai				
	4.2				
5	Biaya non operasional lainnya				
	5.1. Biaya non operasional lainnya				
	5.2				
<b>TOTAL</b>					

### 3. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)

NO	URAIAN	PROGNOSA TH. 20xx	PROYEKSI TH. 20xx	PERKIRAAN MAJU TH. 20xx	SELISIH (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
1.	<b>Pendapatanjasalayanan</b>				
	.....				
	.....				
2.	<b>Pendapatan hasil kerjasama</b>				
	.....				
	.....				
3.	<b>Pendapatan hibah</b>				
	.....				
	.....				
4.	<b>Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah</b>				
	.....				
	.....				
	<b>Jumlah</b>				

4. Anggaran Belanja (Basis Kas)

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
<b>I.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>							
<b>A.</b>	<b>BIAYA PELAYANAN</b>							
<b>1</b>	<b>Biaya Pegawai</b>							
	1.1. Gaji dan Tunjangan Non PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan Non PNS							
	1.3. Lembur							
	.....							
<b>2</b>	<b>Biaya Bahan</b>							
	2.1. Biaya Obat							
	2.2. Biaya Alkes							
	2.3. Biaya bahan dan alat laboratorium							
	2.4. Biaya bahan dan alat radiologi							
	2.5. Biaya bahan makan pasien							
	.....							
<b>3</b>	<b>Biaya Jasa Pelayanan</b>							
	3.1. Biaya jasa pelayanan medis							
	3.2. Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis							
	3.3. Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan							
	3.4. Biaya jasa insentif							
	3.5. Biaya jasa pembinaan							
	.....							
<b>4</b>	<b>Biaya Pemeliharaan</b>							
	4.1. Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik							
	.....							
<b>5</b>	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>							

No	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
	5.1. Biaya perlengkapan ruang pasien							
	5.2. Biaya cetakan rekam medis							
	.....							
6	<b>Biaya Depresiasi</b>							
	.....							
7	<b>Biaya Pelayanan Lainnya</b>							
	7.1. Biaya Pelayanan lainnya							
	7.2. Biaya							
	.....							
<b>B</b>	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>							
1	<b>Biaya Pegawai</b>							
	1.1. Gaji dan Tunjangan PNS							
	1.2. Tambahan Penghasilan PNS							
	1.3. ....							
	.....							
2	<b>Biaya Adm. Kantor</b>							
	2.1. Biaya Benda pos dan pengiriman							
	2.2. Biaya ATK							
	2.3. Biaya cetakan dan penggandaan							
	2.4. Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut							
	2.5. Biaya makanan dan minuman kantor							
	2.6. Biaya makanan dan minuman tamu							
	.....							
3	<b>Biaya pemeliharaan</b>							
	3.1. Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
	3.2. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan							
	3.3. Biaya pemel. alat transportasi & komunikasi							
	3.4. Biaya pemeliharaan Teknologi Informasi							
	3.5. Biaya pemel. sarana & prasarana fisik lainnya							
	.....							
<b>4</b>	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>							
	4.1. Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi							
	4.2. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan							
	4.3. Biaya bahan baker							
	4.4. Biaya gas dapur							
	4.5. Biaya Jasa konsultan dan pihak ketiga lainnya							
	4.6. Biaya langganan listrik, air, telp., faks & Internet							
	4.7. Biaya Pengembangan SIM dan TI							
	4.8. Biaya Langganan Media							
	4.9. Biaya Jasa Kebersihan							
	4.10. Biaya persediaan alat listrik dan elektronik							
	4.11. Biaya Peralatan dan bahan pustaka							
	4.12. Biaya sewa							
	4.13. Biaya representasi							
	.....							
<b>5</b>	<b>Biaya Promosi</b>							
	5.1. Biaya pemasaran dan publikasi							
	5.2. Biaya Komunikasi cepat dan mediamasa							
	.....							
<b>6</b>	<b>Biaya Depresiasi</b>							
	.....							
	.....							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
7	<b>Biaya Umum dan Administrasi Lainnya</b>							
	7.1. Biaya premi asuransi							
	7.2. Biaya perijinan dan legalisasi							
	7.3. Biaya keamanan dan ketertiban							
	7.4. Biaya jasa sewa .....							
	.....							
	.....							
<b>II. BIAYA NON OPERASIONAL</b>								
1	<b>Biaya Bunga</b>							
	1.1. Biaya bunga Bank							
	1.2. Biaya bunga deposito							
	1.3. ....							
	.....							
2	<b>Biaya administrasi bank</b>							
	2.1. Biaya administrasi bank							
	2.2. Biaya .....							
	.....							
3	<b>Kerugian pelepasan aset tetap</b>							
	3.1. Biaya kerugian pelepasan aset tetap							
	3.2. ....							
	.....							
4	<b>Kerugian penurunan nilai</b>							
	4.1. Biaya kerugian penurunan nilai							
	4.2. ....							
	.....							
5	<b>Biaya non operasional lainnya</b>							
	5.1. Biaya non operasional lainnya							

No.	ALOKASI BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		JASA LAYANAN	APBD	APBN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	
52.								
	TOTAL BIAYA							

**5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi (Basis Kas)**

**a. Anggaran Penerimaan Investasi**

<b>NO</b>	<b>JENIS INVESTASI</b>	<b>PROGNOSA TH. 2013</b>	<b>PROYEKSI TH. 2014</b>	<b>PERKIRAAN MAJU TH. 2015</b>
<b>1.</b>	<b>Pelepasan aset</b>			
a.	Kendaraan			
b.	Mesin			
c.	Dst.....			
<b>2.</b>	<b>Pencairan investasi</b>			
a.	Pencairan deposito			
b.	Penjualan surat berharga			
c.	Dst.....			
	<b>Jumlah</b>			



b. Anggaran Pengeluaran Investasi berdasar Sumber Dana

No.	KOMPONEN BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 2014					JUMLAH
		JASA PELAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	APBD	APBN	
1	Perolehan Tanah						
2	Perolehan Peralatan dan Mesin						
3	Perolehan Gedung dan Bangunan						
4	Perolehan Kendaraan						
5	Perolehan Perlengkapan dan Peralatan Kantor						
6	Perolehan jalan, irigasi dan jaringan						
7	Pengeluaran pembelian surat berharga						
8	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi						
9	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya						

c. Anggaran Pengeluaran Investasi berdasar Jenis Belanja

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BRG/JS	BELANJA MODAL	
1	Perolehan Tanah				
2	Perolehan Peralatan dan Mesin				
3	Perolehan Gedung dan Bangunan				
4	Perolehan Kendaraan				
5	Perolehan Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
6	Perolehan jalan, irigasi dan jaringan				
7	Pengeluaran pembelian surat berharga				
8	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sistem informasi				
9	Pengeluaran pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya				
	<b>JUMLAH</b>				

**6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan**

**a. Anggaran Penerimaan Pendanaan**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENDANAAN</b>	<b>PROGNOSA TH. 20xx</b>	<b>PROYEKSI TH.20xx</b>	<b>PERKIRAAN MAJU TH.20xx</b>
1.	Penarikan Pinjaman dari ....			
2.	Dst.....			

**b. Anggaran Pengeluaran Pendanaan**

No.	KOMPONEN BIAYA	SUMBER DANA TAHUN 20xx						JUMLAH
		JASA PELAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	APBD	APBN	LAIN-LAIN	
1	Pembayaran Pinjaman							
	a. Pokok							
	b. Bunga dan Administrasi							
	c. Provisi, denda, .....							
2	Dst.....							
	.....							

c. Anggaran Pengeluaran Pendanaan berdasar Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan

No	Jenis Pengeluaran	JENIS ANGGARAN			JENIS PEMBIAYAAN		Total Bleye
		Belanje pegawai	Berang & Jasa	Model	Penerimaan Pemblayaan	Pengeluaran Pembleyan	
1.	Pembayaran Pinjaman						
a.	Pokok.....						
b.	Bunga dan administrasi.....						
c.	Komisi, provisi, denda.....						
2.	Dst.....						
	<b>JUMLAH</b>						

J. AMBANG BATAS RBA

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah.....% dari anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

(Contoh penentuan ambang batas RBA Tahun Anggaran 2012, dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk Tahun Anggaran 2012:

Tabel berikut adalah data Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2009 s.d 2011).

(dalam juta)

No	Tahun	Anggaran	Realisasi/Prognosa	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5 =(4-3)	6 =(5/3X100)
1	2009	5.000	7.000	2.000	40,00
2	2010	9.000	11.000	3.000	33,33
3	2011	11.000	15.000	4.000	36,36
<b>Jumlah</b>					<b>109,69</b>

(Berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2012 =  $(109,69 : 3) = 36,56$  % dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2012.

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 2012 diperkirakan = Rp 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas =  $36,56$  % X Rp 13.000.000.000,- = Rp 4.752.800.000,-

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp 13.000.000.000,- + Rp 4.752.800.000,-) = Rp 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp 17.752.800.000,- wajib mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan Kepala Daerah).

## BAB IV

### PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20xx

#### Langkah-langkah dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD:

1. Dapatkan prognosa laporan keuangan Tahun Anggaran 20xx sebagaimana tersaji pada Bab II, terdiri dari prognosa :
  - a. Neraca;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dapatkan kebijakan atau target-target, antara lain :
  - a. Piutang akhir tahun yang dianggarkan;
  - b. Persediaan akhir tahun yang dianggarkan; dan
  - c. Hutang akhir tahun yang dianggarkan.
3. Dapatkan dan analisis rencana kegiatan (usaha) pada tahun yang dianggarkan, berupa aktivitas-aktivitas (data dari BAB III):
  - a. Aktivitas Operasional, terdiri dari:
    - 1) Aktivitas yang berpengaruh pada akun pendapatan (akruai);
    - 2) Aktivitas yang berpengaruh pada akun biaya (akruai);
    - 3) Aktivitas yang berpengaruh pada kewajiban jangka pendek; dan
    - 4) Aktivitas lainnya yang berpengaruh pada aset lancar.
  - b. Aktivitas Investasi, terdiri dari:
    - 1) Pembelian/ Belanja Aset Tidak Lancar;
    - 2) Penerimaan hasil investasi; dan
    - 3) Penjualan/Penghentian Investasi.
  - c. Aktivitas Pendanaan  
Aktivitas yang berpengaruh pada keputusan keuangan (sumber dana eksternal), seperti penerimaan dan pembayaran utang.
4. Siapkan proyeksi jurnal transaksi tahun yang dianggarkan, untuk mencatat proyeksi aktivitas operasional, investasi dan pendanaan sebagaimana direncanakan pada butir 2 dan 3.
5. Siapkan Worksheet (Kertas Kerja) Laporan Keuangan yang diproyeksikan, baik kertas kerja Laporan Operasional maupun kertas kerja Neraca.
6. Siapkan proyeksi jurnal penyesuaian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, antara lain:
  - a. Penyisihan piutang;
  - b. Pendapatan yang masih harus diterima;
  - c. Penurunan nilai persediaan;
  - d. Penyusutan dan amortisasi;
  - e. Penurunan nilai aset tetap;
  - f. Provisi/kewajiban estimasian;
  - g. Biaya yang masih harus dibayar; dan
  - h. Reklasifikasi akun (misalnya utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun).
7. Menyajikan Laporan Keuangan yang diproyeksikan komparatif dengan Laporan Keuangan prognosa, dengan urutan penyelesaian:
  - a. Proyeksi Neraca :
    - 1) Diperoleh dari kertas kerja kolom neraca;
    - 2) Sajikan sesuai format neraca.
  - b. Proyeksi Laporan Operasional:
    - 1) Diperoleh dari kertas kerja kolom Laporan Operasional;
    - 2) Kolom kredit merupakan pos-pos pendapatan dan keuntungan;

- 3) Kolom debit merupakan pos-pos biaya dan kerugian;
  - 4) Sajikan sesuai format laporan operasional;
- c. Laporan Arus Kas :
- 1) Menggunakan metode tidak langsung; atau
  - 2) Menggunakan metode langsung.
- d. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan :
- 1) Cukup menjelaskan pos-pos proyeksi laporan keuangan; ditambah
  - 2) Rincian pos-pos (optional).

**A. NERACA**

**PROYEKSI NERACA  
PER 31 DESEMBER 20xx**

*( dalam ribuan rupiah )*

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DES Th. 20xx (Rp)	PROYEKSI PER 31 DES Th. 20xx (Rp)	PERUBAHAN	
			JML Rp	%
1	2	3	4	5
<b>I. ASET</b>				
<b>A. Aset Lancar</b>				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang masih harus diterima				
8. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Lancar.</b>				
<b>B. Investasi Jangka Panjang</b>				
<b>C. Aset Tetap</b>				
1. Tanah				
2. Peralatan dan mesin				
3. Gedung dan bangunan				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Tetap</b>				
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<b>Nilai buku aset tetap</b>				
<b>D. Aset Lain-lain.</b>				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>				
<b>Jumlah Aset (A+B+C+D)</b>				
<b>II. KEWAJIBAN</b>				
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar.				
4. Utang jangka panjang				



1	2	3	4	5
5. Pendapatan yang diterima di muka				
6. Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>				
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang.</b>				
1. Utang jangka panjang				
2. Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang.</b>				
<b>Jumlah Kewajiban (A+B)</b>				
<b>III. EKUITAS</b>				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas Awal				
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat Permanen <sup>6</sup>				
3. Terikat Temporer <sup>7</sup>				
4. Hibah <sup>8</sup>				
5. Donasi				
6. Dst .....				
<b>Jumlah Ekuitas</b>				
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II + III)</b>				

<sup>6</sup> Seperti: APBD yang untuk Investasi.

<sup>7</sup> Seperti: APBD utk Gaji, operasional.

<sup>8</sup> Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerintah/ pemerintah daerah lain.

**B. LAPORAN OPERASIONAL**

**PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 20xx**

( dalam ribuan rupiah )

KOMPONEN	PROGNOSA TH.20xx (Rp)	PROYEKSI TH. 20xx (Rp)	PERUBAHAN	
			JML Rp	%
1	2	3	4	5
<b>A. Pendapatan</b>				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
<b>Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)</b>				
<b>B. Biaya Operasional</b>				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
<b>Jumlah Biaya Operasional (1+2)</b>				
<b>Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional (A-B)</b>				
<b>C. Pendapatan Non Operasional</b>				
<b>D. Biaya Non Operasional</b>				
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos Keuntungan/Kerugian</b>				
<b>Surplus / (Defisit) Sebelum Pos-Pos Luar Biasa</b>				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
<b>Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih</b>				

C. LAPORAN ARUS KAS

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS  
TAHUN 20xx  
(Metode langsung)

(dalam ribuan rupiah)

KOMPONEN	PROGNOSA TH.20xx (Rp)	PROYEKSI TH.20xx (Rp)	PERUBAHAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				
<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional</b>				
<b>B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar <sup>9</sup>				
2. Hasil investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Penerimaan Pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari</b>				

<sup>9</sup> Termasuk di dalamnya investasi jangka panjang (surat utang atau surat ekuitas/saham)

<b>Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

**PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS  
TAHUN 20xx  
(Metode tidak langsung)**

*(dalam ribuan rupiah)*

KOMPONEN	PROGNOSA TH.20xx (Rp)	PROYEKSI TH.20xx (Rp)	PERUBAHAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Pembayaran bunga				
d. Dst.....				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus diterima				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				
a. Utang Usaha				
b. Utang Pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar.				
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional</b>				

<b>B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar <sup>10</sup>				
2. Hasil investasi				
3. Dst.....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

**D. CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN.**

**CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN  
PERIODE 20xx**

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, memuat informasi lebih lanjut tentang:

**a. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan**

Menjelaskan pos-pos laporan keuangan termasuk rincian dan pengungkapan yang memadai (disclosure). Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

**1). Kas dan setara kas, terdiri dari :**

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DES. TH. 20xx (Rp)	PROYEKSI PER 31 DES. TH. 20xx (Rp)
1	2	3
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Giro Bank .....		

<i>Giro Bank .....</i>		
<i>Tabungan Bank .....</i>		
<i>Tabungan Bank .....</i>		
<i>Deposito Bank .....</i>		
<i>Deposito Bank .....</i>		
<b>JUMLAH</b>		

**2). Piutang usaha, terdiri dari:**

KOMPONEN	PROGNOSA PER 31 DES. TH. 20xx (Rp)	PROYEKSI PER 31 DES. TH. 20xx (Rp)
1	2	3
<i>Piutang kepada .....</i>		
<i>Piutang kepada .....</i>		
<i>Piutang kepada .....</i>		
<b>JUMLAH</b>		

**b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya**

.....  
.....

**BABV  
PENU TUP**

**A. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM IMPLEMENTASI KEGIATAN**

**BLUD**

*(Memuat antara lain tentang: penghapusan pitang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, remunerasi pejabat pengelola dan pegawai serta dewan pengawas).*

**B. KESIMPULAN**

*(Bersikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu).*

**Nanga Bulik, ..... 20xx**

**BLUD RSUD LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU**  
**Pemimpin**

**(.....)**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR**  
**TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,**  
**PENGAJUAN, PENETAPAN DAN**  
**PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN**  
**ANGGARAN BADAN LAYANAN**  
**UMUM DAERAH RUMAH SAKIT**  
**UMUM DAERAH LAMANDAU.**

**Contoh Ringkasan Anggaran Sebagai sampel dari RSUD**  
**dr. Moewardi Tahun 2011**

**RINGKASAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK KONSOLIDASI DENGAN**  
**APBD/RKA-SKPD**



URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.02. - RSUD Dr. Moewardi Surakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	<u>146.000.000.000</u>	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	146.000.000.000	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	146.000.000.000	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	<u>216.043.798.000</u>	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	58.430.548.000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	58.430.548.000	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	157.613.250.000	
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<u>8.000.000.000</u>	
1.02.1.02.02.01.16.	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	4.500.000.000	
1.02.1.02.02.01.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000.000	
1.02.1.02.02.01.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN	3.500.000.000	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000.000	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	<u>343.250.000</u>	
1.02.1.02.02.02.05.	KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	343.250.000	
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	343.250.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASARHUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.02.12.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	<u>146.000.000.000</u>	
1.02.1.02.02.12.01.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN	146.000.000.000	
1.02.1.02.02.12.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.239.025.000	
1.02.1.02.02.12.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.060.975.000	
1.02.1.02.02.12.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.700.000.000	
1.02.1.02.02.17.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>70.000.000</u>	
1.02.1.02.02.17.02.	KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN RS	70.000.000	
1.02.1.02.02.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.250.000	
1.02.1.02.02.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.750.000	
1.02.1.02.02.17.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.20.	PROGRAM AKSES PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	<u>3.100.000.000</u>	
1.02.1.02.02.20.01.	KEGIATAN PPKPA	40.000.000	
1.02.1.02.02.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	
1.02.1.02.02.20.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.20.03.	KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	2.000.000.000	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	
1.02.1.02.02.20.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000	
1.02.1.02.02.20.06.	KEGIATAN PELAYANAN KRISIS	60.000.000	
1.02.1.02.02.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.625.000	
1.02.1.02.02.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.375.000	
1.02.1.02.02.20.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	
1.02.1.02.02.20.10.	KEGIATAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN RS	1.000.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASARHUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.02.20.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.20.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	
1.02.1.02.02.20.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000	
1.02.1.02.02.21.	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	<u>100.000.000</u>	
1.02.1.02.02.21.20.	KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM RS	100.000.000	
1.02.1.02.02.21.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	
1.02.1.02.02.21.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000	
1.02.1.02.02.21.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	-	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor.	343.250.000
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.000.000.000
5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran.	2.000.000.000
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.000.000.000
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan.	1.000.000.000
5.2.3.32.	Belanja Modal BLUD	3.700.000.000
5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	3.700.000.000
	Jumlah Belanja	216.043.798.000
	Surplus/(Defisit)	(70.043.798.000)

Semarang,  
 Direktur RSUD Dr. Moewardi  
 PROVINSI JAWA TENGAH

**BASOEKISOETARDJO**  
 NIP. 19581018 198603 1 009

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JAWATAN	PARTAI
WASUP	
SEKDA	
ASIS ION	
KABAG	
KAGUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
 pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

  
**M A R U K A N**

Diundangkan di Nanga Bulik  
 pada tanggal  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING**


(Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA).

# LAMPIRAN

BAGIAN HUKUM	SETDA KABUPATEN LAMANDAU
JARATIAN PA. AF	
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

Diundangkan di Nanga Bulik

pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**BADANLAYANANUMUMDAERAH**  
**RSUD LAMANDAU**

Jl. Trans Kalimantan Km.04 Nanga Bulik Kode Pos : 74662  
Telepon :Line IGD (0532) 2067093LineLoket Pendaftaran (0532) 2067382  
E-Mail: rsud.lamandaukab@gmail.com

**NOTA PERTIMBANGAN**

- Kepada Yth : Bapak Bupati Lamandau melalui Setda Bagian Hukum Kab. Lamandau
- Dari : Pit. Direktur RSUD Kabupaten Lamandau
- Nomor : 094.1/664/V/ RSUD/2018
- Tanggal : 30 Mei 2018
- Perihal : Usulan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Pertimbangan : 1. Bahwa berdasarkan hasil dari fasilitasi Setda Bagian Hukum Kab. Lamandau dan Bagian Hukum RSUD Lamandau Ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau telah dianalisa dan di sempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
2. Bahwa sangat pentingnya Draft / Konsep Peraturan Bupati ini kami usulkan dan kami sampaikan sebagai dasar kami pihak SOPD RSUD Lamandau untuk pedoman dalam proses penganggaran BLUD RSUD.
- Usul/ Saran : Untuk itu jika Bapak berkenan bersama ini kami Lampirkan Draft / konsep Peraturan Bupati Lamandau untuk ditetapkan.

Demikian pertimbangan ini disampaikan atas persetujuan, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Pit. Direktur RSUD Lamandau,

  
**dr. JOZEB HF. RUMOUW, M.Si**  
NIP. 19590912 199103 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078  
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah  
Kode Pos 74662

**NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU**

Nomor : 188/214 /V/HUK/2018


Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau  
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.  
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan Bupati ini.  
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan Bupati ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, Mei 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN LAMANDAU,

  
ELY YOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

Yts. Bp. Seleda

- sudah direvisi dapat ditanda tangani oleh Bp. Bupati
- HES

ASST  
5/16

Wk. Bagian Hukum

- Mohon tanda tangan
- Mohon tanda tangan

 5/16